

**POLA PEMBINAAN ADMINISTRASI URUSAN KEUANGAN
(BENDAHARA) GAMPONG DI KECAMATAN SETIA BAKTI
KABUPATEN ACEH JAYA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**EKA SAFRIANA
NIM. 170403052**

**Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Program Studi Manajemen Dakwah**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar S-1 Dalam Ilmu Dakwah Dan Komunikasi
Prodi Manajemen Dakwah**

Oleh :

EKA SAFRIANA

NIM. 170403052

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prodi Manajemen Dakwah**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. Maimun Ibrahim, M.A.
NIP. 195309061989031003

Pembimbing II



Fakhrudin, SE, MM.
NIP. 1964061662014111002

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah Dan Komunikasi
Prodi Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh:

EKA SAFRIANA
NIM. 170403052


Pada Hari/Tanggal

Selasa, 15 Januari 2022 M
13 Jumadil Akhir 1443 H

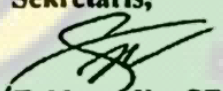
di

Darussalam - Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah:

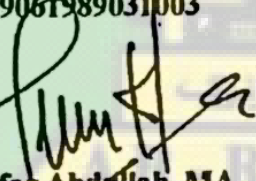
Ketua,


Drs. H. Maimun Ibrahim, MA
NIP. 195309061989031003

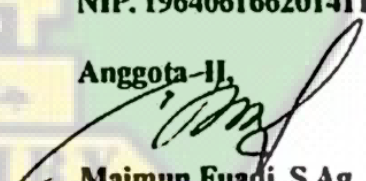
Sekretaris,


Fakhruddin, SE, MM
NIP. 1964061662014111002

Anggota I,


Dr. M. Jakfas Abdillah, MA
NIP. 1952080101197031010

Anggota-II,


Maimun Fuadi, S.Ag, M. Ag
NIP. 197511032009011008

Mengetahui:

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry


Dr. Fakhri S. Sds, MA
NIP. 196411291998031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Safriana

NIM : 170403052

Jenjang : Srata Satu (S-1)

Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/ Manajemen Dakwah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Pola Pembinaan Administrasi Keuangan (Bendahara) Gampong di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya)**” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika pada kemudian hari ternyata saya tidak benar, maka saya sanggup menerima segala sanksi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

BandaAceh, 15 Januari 2022
Yang Menyatakan,



Eka Safriana
NIM. 170403052

ABSTRAK

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota. Menurut Qanun Nomor 1 tahun 2019 dana desa diperuntukan untuk membiayai belanja pemerintah gampong di bidang penyelenggaraan pemerintah gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan kebutuhan tak terduga. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola pembinaan administrasi keuangan (bendahara) dalam pembanguna, apa saja yang menjadi prioritas penggunaan dana desa di Gampong Sapek Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi lapangan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara sesuai dengan amanat permendes PDTT Nomor 16 tahun 2018, hal ini dapat dibuktikan dengan program-program pembangunan yang telah tereliasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah gampong melalui musyawarah dusun, musyawarah gampong dan musrembang. Adapun sistematika pelayanan administrasi kependudukan masyarakat harus menjumpai Keuchik atau dirumah sekretaris desa dan kemudian meminta tanda tangan keuchik sekaligus sempel desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menjalankan perannya dengan baik yaitu melayani masyarakat dengan membantu mengurus keperluan Administrasi kependudukan. Pemerintah desa telah semaksimal mungkin meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dengan menyediakan sarana dan prasarana publik. Pemerintah desa juga memberikan informasi dan mengarahkan masyarakat untuk memenuhi syarat-syarat pengurusan administrasi.

Kata kunci: **Dana desa, keuangan, administrasi**

KATA PENGANTAR

سَمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT sungguh atas segala rahmat dan hidayah serta rezeki yang Allah berikanlah penulis Akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa sriksi berjudul “Pola Pembinaan Administrasi Keuangan (bendahara) Gampong di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya”. Shalawat dan salam penulis hantarkan dengan segala kerendahan hati keatas pangkuan Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau.

Penulis sriksi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi program studi Manajemen Dakwah. Dalam penulisan sriksi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat Allah SWT yang telah memudahkan, serta bimbingan, bantuan, nasehat dan serta kerja sama dari berbagai pihak, sehingga kendala-kendala tersebut dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang istimewa kepada Ibunda Agustina dan Ayahanda Darmi Irwansyah yang telah mengorbankan segala sesuatunya untuk keberhasilan dan kesuksesan dari awal hingga akhir proses perkuliahan berlangsung, yaitu tidak dapat penulis tuturkan dengan kata-kata, hanya kepada Allahlah penulis kembalikan dan semoga keduanya senantiasa dalam lindungan-Nya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan yang tak ternilai, dan banyak

membantu dalam proses perkuliahan baik dari segi material maupun non material. Terutama kepada Rahmadi (adik kandung) yang telah memberikan semangat dan doa setiap saat dan kepada bapak Fauzi yang telah banyak membantu penulis. Disamping itu, ucapan terimakasih penulis juga diajukan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Yang tercinta Ayahhanda Abu Hasan, dan Ibunda Lisriani, Abang Kandung Rahmat Novan, serta Adik-adik ku, karena berbak bimbingan, dorongan, pengorbanan, kasihsyang dan do'a mereka hingga penulis bisa menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi
2. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos.,MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Jailani,M.Si selaku ketua Jurusan Manajemen Dakwah.
4. Bapak maimun ibrahin dan Bapak Fakhruddin, SE,MM. Selaku pembimbing I dan II dalam penyusunan skripsi, yang telah meluapkan waktunya dari awal hingga akhir, serta menjadi motivator terhebat dalam lika-liku penyelesaian skripsi ini.
5. Terimakasih kepada Dosen MD lain yang namanya tidak bisa disebut satu persatu, terima kasih atas ilmu yang diberikan selama ini.
6. Terimakasih kepada seluruh staf akademik yang telah membantu penulis dalam pembuatan surat dan segala keperluan agar skripsi dapat terselesaikan.
7. Terima kasih kepada Nia niati, santia, sarena, meli, elfira, elsa, yan g telah memberikan semangat dan bantuan sehingga sehingga skripsi ini selesai.

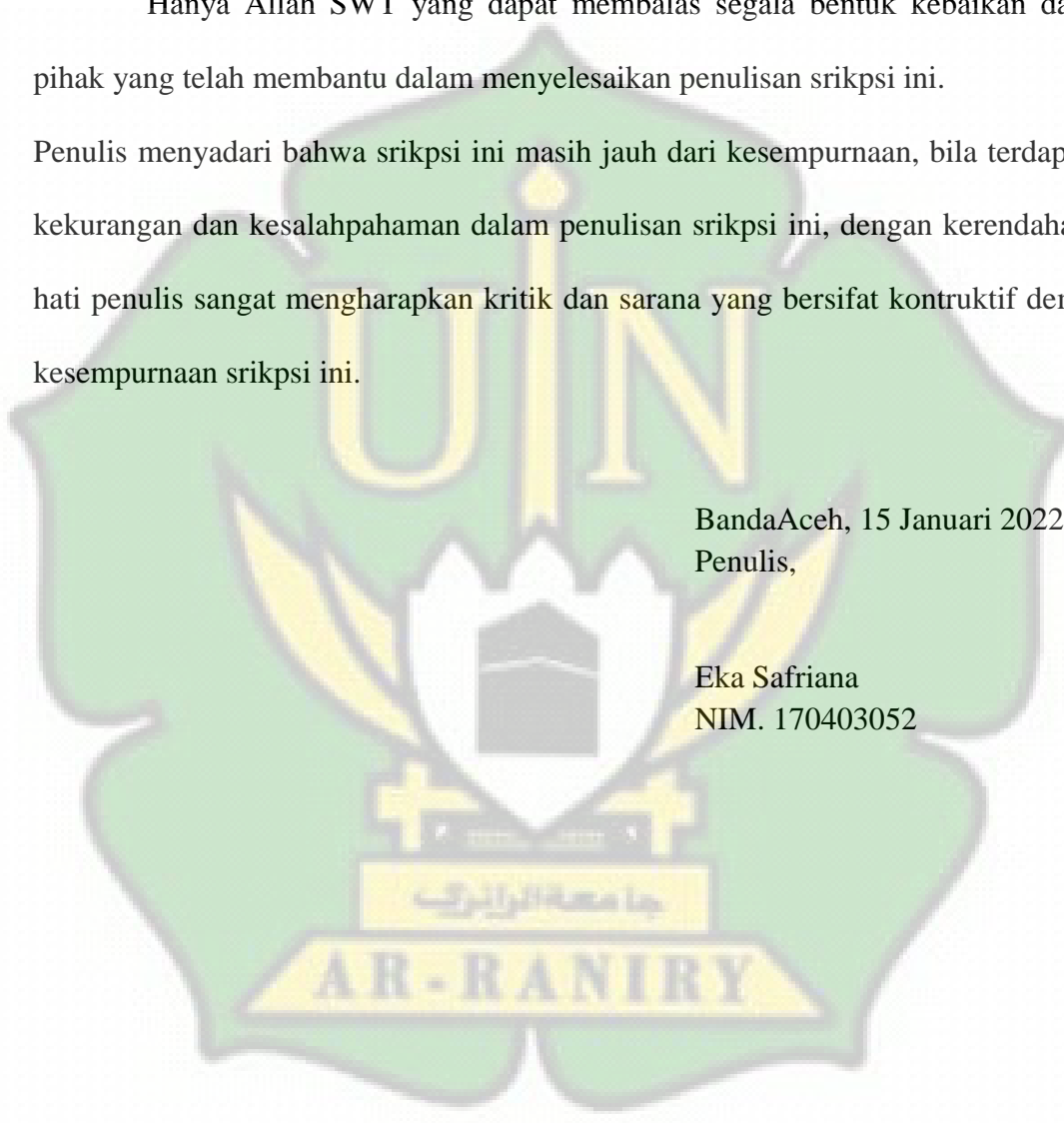
8. Kepada para Responden yang telah membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan kesediaanya.

Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala bentuk kebaikan dari pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan sriksi ini.

Penulis menyadari bahwa sriksi ini masih jauh dari kesempurnaan, bila terdapat kekurangan dan kesalahpahaman dalam penulisan sriksi ini, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan sarana yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan sriksi ini.

BandaAceh, 15 Januari 2022
Penulis,

Eka Safriana
NIM. 170403052



DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Peneltian	11
E. Penjelasan Istilah	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORITI	16
A. Penelitian terdahulu	16
B. Pengertian Pola Pembinaan.....	19
C. Administrasi Pemerintah Desa.....	23
D. Fungsi Manajemen Keuangan	25
E. Tujuan manajemen keuangan	26
F. Jenis-jenis laporan keuangan	30
G. Krakteristik Laporan Keuangan.....	31
H. Fungsi Laporan Keuangan	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Sumber data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	44
A. Profil Gampong Sapek.....	44
B. Mekanisme Administrasi Keuangan (Bendahara) Gampong	58
C. Perencanaan Pembangunan Masyarakat Gampong Sapek	59
D. Pelaksanaan Musyawarah Dalam Gampong Sapek.....	60

BAB V_PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYATHIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah implomen yang diwawancara	40
Tabel 4.2	Sejarah pemerintah gampong	46
Tabel 4.3	Sruktur pemerintahan gampong sapek	49
Tabel 4.4	Sruktur tuha peut gampong	50
Tabel 4.5	Jumlah penduduk berdasarkan umum	53
Tabel 4.6	Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan	54
Tabel 4.7	Jumlah penduduk berdasarkan jender	54
Tabel 4.8	Mata pencaharian gampong sapek	55
Tabel 4.9	Jenis sarana dan prasarana gampong sapek	58
Tabel 4.10	Rekapan pagu anggaran gampong dalam kecamatan setia bakti ..	67



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran 2: Surat izin penelitian dari fakultas dakwah dan komunikasi
- Lampiran 3: Surat izin penelitian dari Kecamatan Setia Bakti
- Lampiran 4: Surat izin penelitian Gampong Sapek
- Lampiran 5: Gambar hasil sidang munaqasyah
- Lampiran 6: Daftar riwayat hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang pertimbangan keuangan Pusat Daerah, dijelaskan bahwa pembangian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara profesional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Regulasi ini disambut positif dari semua pihak dengan dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang ada pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.¹

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah yang secara pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman desa tersesebut menempatkan gampong sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengatur dan mengurus warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat

¹Azwardi, Sukanto, Efektifitas Alokasi Dana Desa (add) da Kemiskinan di Provinsi Sumatra Selatan, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 12, No.1 (Oktober 2019), hlm. 29-41.

penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Gampong menjadi garda terdepan dalam mencapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta peraturan Materi Dalam Negri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Gampong, maka sebuah Gampong diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demogratisasi yang berkembang digampong yang terangkum dalam dokumen perencanaan pembangunan gampong yang dihasilkan dari musyawarah pembangunan gampong.

Dana desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan transfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Dana desa dialokasikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya ke pemerintah daerah, penyaruran dana desa merupakan bentuk alokasi transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dana desa akan terus dialkasikan setiap tahunnya sesuai dengan UU No. 06 Tahun 2014.²

Undang-undang Nomor 6/2014 tentang desa dalam mengatur kewenangan yang ditugaskan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan dalam konteks lokal berskala desa sebagai instrumen relatif baru dikeluarkan oleh pemerintah yang ditindaklanjuti dengan peraturan Nomor 43 tahun 2014 yang membahas. Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 yang menjelaskan

² Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang menjelaskan tentang desa

dana desa dan peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 yang menjelaskan dana bersumber dari APBN.³

Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan untuk tujuan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Pemendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 9). Tujuan utama dari dana desa yaitu stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangunan diwilayahnya. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus (Pemedagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 10).

Berdasarkan peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 disebut bahwa proiritas penggunaan Dana Desa tahun 2016 adalah untuk bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa. Namun melalui melalui rapat kabinet dua pernyataan langsung, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo lebih menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2016 adalah untuk pembangunan infrastruktur dasar desa, dan pelaksanaannya dilakukan secara padat. Alokasi dasarnya akan dibagi rata keseluruh Desa sebesar 90 persen. Sedangkan Alokasi Proporsional yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografi sebesar 10 persen.

³ PP Nomor. 60/2014 yang menjelaskan tentang dana desa yang bersumber dari APBN

Dokumen perencanaan dituangkan kedalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) yang mempunyai masa waktu selama 6 (enam) tahun dan selanjutnya dijabarkan setiap tahunnya kedalam dokumen rencana kerja pembangunan gampong (RKPG) dan RKPG menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Adapun Dasar hukum penyusunan RKPG Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025.
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

8. Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
9. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengDesa (berita negara republik indonesia tahun 2014 nomor 2093).
10. Peraturan menteri dalam negeri indonesia Nomor 114 tahun 2016 tentang pedoman pembangunan desa (berita negara indonesia tahun 2014 nomor 2094).
11. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan Desa (berita negara republik indonesia tahun 2015 nomor 2094).S
12. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman desa kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa (berita negara republik indonesia tahun 2015 nomor 158).
13. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomr 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 (berita negara republik indonesia tahun 2017 nomor 1359).
14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang pemerintah gampong (lembaran daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 4).

15. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 71 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan alokasi dana gampong, bagi hasil pajak daerah bagi hasil retribusi daerah untuk gampong Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020.

16. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal-usul kewenangan lokal berskala Gampong.⁴

Dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong dijelaskan bahwa, penyelenggaraan kewenangan gampong dilaksanakan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Gampong yang ditandai oleh APBG (Anggaran Pendapatan Belanja Gampong), juga dapat ditandai oleh ADG, dan DD, dari APBN, dan ADG, dari APBK.⁵ Dalam menyelenggarakan roda pemerintah gampong agar berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBK untuk alokasi dana gampong setiap tahunnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBK setelah dikurangi dana alokasi khusus. Penglokasian ADG tersebut dilakukan dengan ketentuan: 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata keseluruh gampong; dan 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional. Pengalokasian ini dilakukan dengan mempertimbangkan:

⁴ Profil Gampong Sapek, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) tahun anggaran 2021.

⁵Qanun Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong.

- a. Kebutuhan Penghasilan tetap keuchik dan perangkat gampong;
- b. Jumlah penduduk gampong, angka kemiskinan gampong, luas wilayah, dan tingkat kesulitan grafis gampong;

Alokasi dana gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar desa untuk mendanai kebuthan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan . Berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2019 pendapatan gampong terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Gampong (PAG)

PAG merupakan pendapatan yang berasal dari gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala gampong yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, partisipasi gotong royong masyarakat serta pendapatan gampong.

- b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah semua pemasukan gampong melalui rekening gampong yang meliputi:

1. Dana desa adalah yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten/Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai kemasyarakatan pemerintahan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah adalah bagian keuangan daerah yang berasal dari pembagian hasil pajak dan retribusi masing-masing daerah.
3. Alokasi dana gampong merupakan bagian keuangan gampong yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk gampong yang dibagikan secara proposional.

c. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan gampong yang disahkan seperti hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan gampong yang sah.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2018 juga dijelaskan bahwa pemerintahan gampong adalah keuchik dan tuha peut gampong beserta perangkatnya yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pemerintahan gampong adalah keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.⁷ Dengan adanya dana desa tersebut, maka pemerintahan gampong dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam

⁶ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

⁷ Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Desa.

memprioritaskan dana desa. Sedangkan akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang dicapai pemerintah dalam memprioritaskan dana desa.⁸

Berdasarkan observasi awal peneliti melihat baik dilapangan maupun pemberitaan dimedia, sejak dikucurnya dana desa pada tahun 2015 silam, prioritas penggunaan dana desa belum berjalan dengan semestinya salah satunya adalah penggunaannya belum tepat sasaran, hal ini ditinjau dari angka kemiskinan masyarakat yang sangat tinggi yaitu mencapai 819 ribu jiwa atau 15,32% dan Aceh masih berada pada posisi pertama penduduk miskin di Sumatra, dan posisi keenam di seluruh Indonesia setelah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo.

Prioritas kebijakan program pembangunan gampong yang tersusun dalam RKP Gampong Tahun 2020 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk mengulangi permasalahan dimasyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihkan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Gampong secara langsung dapat berperan aktif mengurangi kemiskinan gampong.

⁸ Risma Hafid, 2017 "Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bunggoro Kabupaten Pangkep,"(Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Fisip, Universitas Hasanuddin: Makassar, hlm. 22.

Menurut fenomena diatas bahwa pemerintah gampong Sapek dalam melaksanakan penggunaan anggran belum sesuai dengan peraturan Nomor 32 Tahun 2015 maka untuk itu lebih dasarnya peneliti tertarik untuk mengetahui **“Pola Pembinaan Administrasi Bagian Keuangan (Bendahara) Gampong di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana tata pembinaan Administrasi Dana Desa dalam Pembangunan Gampong Sapek Kecamatan Setia Bakti?
2. Bagaimana pengelolaan Dana Desa di Gampong Sapek Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu yang menyebabkan penelitian ini dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tata pembinaan Administrasi Dana Desa Pembangunan Gampong Sapek Kecamatan Setia Bakti
2. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Desa di Gampong Sapek Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadi dasar bagi masyarakat khususnya perangkat desa dalam menjalankan prioritas penggunaan dana desa/anggran yang lebih baik dan tepat sasaran.
2. Diharapkan dapat menjadi pedoman pemerintah setempat dalam memonitor pembangunan desa yang bersumber dari dana gampong.
3. Menjadi bahan telaah/kajian bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pola pembinaan administrasi keuangan (bendahara) digampong.

E. Penjelasan Istilah

Berdasarkan judul penelitian ini “Pola Pembinaan Administrasi Keuangan (Bendahara) Gampong di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya”

1. Pengertian pola

Pola adalah corak, model, cara kerja, bentuk, (srktur) yang tepat.⁹ Pola sebagian ditentukan oleh tugas khusus yaitu salah satunya lembaga sosial yang diberi tanggung jawab untuk mengubah suatu organisme biologis menjadi manusia. Pada saat sebuah lembaga mulai membentuk kepribadian seseorang dalam hal-hal yang penting. Menurut Prajudi Atmosudirdjo pola adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan tujuan tertentu.

⁹ Depdikup, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1988). Hal 54

Jadi, pola menurut penulis dapat disimpulkan bahwa pola berarti gambar, contoh model. Kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang baik.

2. Pengertian Pembinaan

Pembinaan merupakan terjemahan dari kata training yang berarti latihan, pendidikan, pembinaan. Pembinaan menekankan pada pengembangan sikap, kemampuan, dan kecakapan. Unsur dari pembinaan adalah mendapatkan sikap (attitude), dan kecakapan (skill).¹⁰ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata pembinaan berasal dari kata dasar bina yang berarti suatu proses, cara, pembuatan membina atau pembaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Menurut Aisyah Dahlan memberikan arti pembinaan adalah membangun pertumbuhan dan kesempurnaan dalam arti kata seluas-luasnya, baik yang rohani maupun jasmani. Adapun Ali Addul Halim Mahmud menyebutkan bahwa proses pembinaan merupakan cara ideal dalam berinteraksi dengan fitrah manusia, baik secara langsung (berupa kata-kata) maupun tidak langsung (berupa keteladanan) untuk proses perubahan dalam diri manusia menuju kondisi yang lebih baik.

Jadi, pembinaan menurut penulis dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah proses pengembangan yang diawali dengan mendirikan, menumbuhkan dan memelihara pertumbuhan tersebut, disertai usaha-usaha perbaikan,

¹⁰ A. Mangunhardjana Pembinaan, Arti dan Metodenya, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm 11

penyempurnaan dan pengembangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan hasil yang maksimal.

1. Pengertian Administrasi

Asministrasi kegiatan yang diperoleh dengan menetapkan tujuan bersama yang berkaitan dan pemerintahan, organisasi dan tata usaha.¹¹ Leonard D.White mengemukakan bahwa administrasiialah proses yang selalu terdapat pada usaha kelompok, publik privat, sipil atau militer, sekala besar atau kecil. Menurut sondang siagin, administrasi adalah keseluruhan proses yang kerja sama yang dilakukan oleh beberapa orang sehingga memperoleh tujuan tertentu.¹²

Menurut Philip M Hajon, administrasi adalah sebuah kegiatan yang meliputi kerja sama dalam lingkungan pemerintahan, meliputi keembagaan eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹³ Pengertian Administrasi secara khusus adalah suatu bentuk kegiatan yang mencakup pencatatan, penyuratan,pembukuan sederhana, pengertuan pada komputer, serta aktivitas lain yang bersifat teknis dalam hal ketatausahaan. Suatu laporan keuanan (finansial statement) akan menjadi lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan, apabila dengan informasi tersebut dapat diprediksi apa yang akan terjadi dimasa mendatang. Dengan mengolah lebih lanjut laporan keuangan melalui proses perbandingan, evaluasi dan analisis tren,

¹¹ Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kamus bahasa indonesia, (Jakarta: Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa, 2016) Diakses Tanggal 2 Maret 2020

¹² Wirman Syafri, Studi tentang Administrasi Publik, (PT Gloka Askara Pratama:2012) hlm. 9

¹³ Philip M Hajon. Et Syarifuddin, Hukum Negara, (Banda Aceh:Syiah kuala Universitas Press: 2010), hlm,14

akan mampu memprediksi apa yang mungkin akan terjadi mendatang, sehingga disinilah laporan keuangan begitu diperlukan.

2. Pengertian Keuangan

Keuangan adalah istilah untuk hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, penciptaan, dan studi tentang uang dan investasi. Keuangan dapat secara luas dibagi menjadi tiga kategori.

- a. Keuangan publik
- b. Keuangan perusahaan
- c. Keuangan pribadi

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi penjelasan yang terkandung di dalam masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan penelitian ini. Adapun seluruh penulisan disusun secara sistematika sebagai berikut:

Pada bab I membahas konsep dasar penelitian, yaitu mengenai: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika penelitian yang berupa uraian singkat mengenai bab yang terdapat dalam skripsi.

Pada bab II membahas tentang teori-teori dasar yang dibutuhkan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang dapat menjelaskan macam-macam variabel tersebut.

Pada bab III membahas mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan.

Pada bab IV menjelaskan tentang gambaran umum, responden, deskriptif jawaban responden, hasil penelitian dan pembahasan.

Pada bab V menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dapat ditarik, dan saran yang diberikan untuk penelitian sebelumnya.



BAB II
LANDASAN TEORITI

A. Penelitian terdahulu

No	Nama peneliti dan tahun	Judul penelitian	Fokus penelitian	Hasil Penelitian
1	Risma Hafid, 2017.	Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Manggilu Kecamatan Bunggono Kabupaten Pangkep).	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaata dana desa digunakan sesuai program, untuk mengetahui yang dihasilkan dari pemanfaatan dana desa dan	Dari hasil data menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan, kemanfaatan desa, dan keterlibatan masyarakat didesa manggilu dalam pemanfaatan dana desa sudah

			untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa	dikatakan efektif. ¹⁴
2	Miftahuddin	Akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Desa(studi kasus di desa pangguharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran pemerintah desa atas akuntabilitas dan desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa yang diterapkan oleh pemerintah desa punghunghorjo sudah sesuai dengan

¹⁴ Risma Hafid, 2017 “ Pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan Desa Manggilu Kecamatan Bunggoro Kabupaten Pangkep” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

				<p>perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku. Disamping itu proses pengelolaan dana desa melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pengawasan. Meskipun pengelolaan dana desa dilakukan dengan baik, tetapi pemahaman</p>
--	--	--	--	---

				masyarakat mengenai kebijakan dana desa masih rendah
--	--	--	--	--

B . Pengertian Pola Pembinaan

Definisi pola menurut kamus umum Bahasa Indonesia, pola berarti gambar, contoh dan model. Adapun pembinaan adalah usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara beradanya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁵ Pembinaan ini meliputi kegiatan-kegiatan melaksanakan atau menyelenggarakan pengaturan sesuatu sehingga dapat dikerjakan dengan baik, terbib, teratur, rapi dan seksama menurut rencana program pelaksanaan (dengan ketentuan, petunjuk, syarat, norma, sistem, dan metode). Secara efektif dan efisien dala mencapai tjuan memperoleh hasil yang diharapkan semaksimal mungkin. Pombinaan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, suatu dasar kepribadian yang seimbang utuh dan selaras, pegetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta prakarsa sendiri menambah meningkat dengan mengembang kearah terciptanya

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Indonesia, 2008),hal,1197

martabat, mutu dan kemampuan manusia yang optimal, dan pribadi yang mandiri.¹⁶

Selain itu, pembinaan juga mengandung makna pembaharuan, yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan dan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu berasal dari sudut pembaharuan yaitu mengubah suatu menjadi yang baru dan memiliki nilai-nilai lebih baik bagi kehidupan masa yang akan datang. Sedangkan pembinaan yang berasal dari sudut pengawasan yaitu usaha untuk membuat suatu lebih sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

Menurut Walgio, bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu itu untuk menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan didalam kehidupan sehingga individu atau dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Sesuai dengan teori-teori bimbingan, maka selanjutnya penulis menggunakan istilah pembinaan.

Pembinaan dilakukan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilakukan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan. Hal ini dilakukan dengan masalah pembinaan, yang dijelaskan oleh pendapat para ahli yaitu:

¹⁶ Zakiah Derajat, Kesehatan Mental Dalam Keluarga, Cet 3 (Jakarta: Pusat antara, 1993), hal 41. Dalam Skripsi Misnidarti

- a. Menurut Soetopo, H. Dan Soemanto, W (1991:43) bahwa “pembinaan adalah suatu kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada.”
 - b. Menurut Pamuji, S (1985:10) bahwa “pembinaan berasal dari kata “bina” yang berarti sama dengan “bangun”, jadi pembinaan dapat diartikan sebagai kegunaan yaitu: merubah suatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang tinggi.
 - c. Menurut Hidayat, S (1979:10) bahwa “pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan sikap dan kerampilan anak didik dengan tindakan-tindakan, pengarahan, pembimbingan, pembangunan dan simulasi dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan
 - d. Menurut Mathis, S, bahwa “pembinaan adalah bantuan dari seseorang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan
1. Jenis-Jenis pola

Terdapat beberapa jenis pola yaitu:

 - a. Pola yang otoriter

Menurut Enug ada beberapa pendekatan yang di ikuti atasan dalam berhubungan dan membina bawahannya salah satu diantaranya adalah sikap dan pendidikan otoriter. Pola pembinaan otoriter ditandai dengan ciri-ciri sikap atasan atau pemimpin yang kaku dan keras dalam

menerapkan peraturan-peraturan maupun disiplin. Pemimpin bersikap memaksa dengan selalu menuntut kepatuhan bawahan agar bertingkah laku seperti yang dikehendaki oleh atasannya.

b. Pola yang permisif

Menurut Krartono pola pembinaan permisif, atasan memberi kebebasan sepenuhnya dan bawahan diijinkan membuat keputusan sendiri.

c. Pola yang demogratis

Hurlock berpendapat bahwa pola pembinaan demograsi adalah salah satu teknik atau cara membimbing bawahan, dimana pemimpin atau atasan bersikap terbuka terhadap tuntutan dan pendapat yang dikemukakan bawahan. Pola ini lebih memusatkan perhatian pada aspek pendidikan daripada hukuman.¹⁷

2. Bentuk Pola Pembinaan

Bentuk pola pembinaan seperti:

- a. Pemantapan sikap
- b. Pemantapan prilaku

Pembinaan diletakkan pada pemantapan prilaku, materi pembinaan mencakup tentang ketauhidan atau akidah, fiqih, akhlak, pengetahuan umum, iqraq, Al-Quran, dan Hadist.

¹⁷ Enung Fatimah, Psikologi Perkembangan (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal 85

C. Administrasi Pemerintah Desa

Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan formasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi.¹⁸ Sedangkan administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa. Adapun penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa adalah:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Pelaksanaan pembangunan desa
3. Pembinaan kemasyarakatan
4. Pemberdayaan masyarakat

1. Unsur-unsur Administrasi

Dalam proses pelaksanaan kegiatan administrasi, maka harus memiliki unsur yang saling berkaitan antara satu sama lain:

- a. Manajemen, yaitu kegiatan untuk menggerakkan kelompok orang untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan, perencanaan, pembimbing, pembuatan keputusan dan pengawasan.
- b. Komunikasi, yaitu mengelola dengan membuat estimasi anggaran.
- c. Keuangan, yaitu mengelola dengan membuat estimasi anggaran
- d. Kepegawaian, yaitu pengaturan atau yang mengenai masalah pegawai
- e. Tata usaha, yaitu penghimpun, pencatatan, pengelola, dan pengirim dalam upaya kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

¹⁸ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi desa

2 . Pelayanan Administrasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan administrasi adalah upaya pemerintah desa untuk melayani masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan seperti kartu keluarga (kk), KTP, Akta, dan keperluan pencatatan lainnya.¹⁹

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aspek yang harus diperbaiki dalam meningkatkan pelayanan yaitu ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana seperti kantor keuchik, peralatan kantor, komputer dan berbagai perlengkapan lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat penting dan menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Karena dengan adanya sarana pelayanan yang memadai dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat selama berada dalam ruangan pelayanan.²⁰ Misalnya dengan adanya kantor keuchik masyarakat lebih mudah untuk mengakses pelayanan administrasi. Kantor keuchik merupakan sarana pendukung dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi manajemen kerja organisasi yang memberikan citra dalam kewibawaan para aparatur dalam melayani masyarakat gampong.

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan. Manusia tidak dapat dipisahkan itu organisasi masa atau negara.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

²⁰ Yayat Rakuyat, Kualitas pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan DiKecamatan Pasir Jambu, Jurnal Ilmiah Magister ilmu administrasi (JIMIA) NO.2 Tahun XI Juni 2017.Hlm 60

3. Faktor Pelayanan Administrasi

dari pelayanan, karena dalam rangka mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelayanan yang dibutuhkan manusia pada dasarnya ada dua jenis, yaitu layanan fisik, yang bersifat pribadi sebagai manusi dan layanan adminifratif yang diberikan orang lain selaku anggota organisasi, baik

Menurut Philip Kolter memberikan lima determinan kualitas pelayanan yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Kepercayaan atau kehendalan yaitu kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan terpecaya
- b. Daya tanggap yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat.
- c. Keyakinan yaitu sebuah pengetahuan dan kesopanan staf adinistrasi serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan.
- d. Empati yaitu syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi pelanggan
- e. Bewujud yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan media komunikasi.

D. Fungsi Manajemen Keuangan

Ilmu manajemen keuangan berfungsi sebagai pedoman bagi manajer perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan. Artinya seorang manajer keuangan boleh melakukan kreativian bervikir, akan tetapi semua itu tetap tidak mengesampingkan kaudah-kaidah yang berlaku dalam ilmu manajemen

keuangan. Dengan memahami ilmu manajemen keuangan dengan baik yang berada diposisi marketing, produksi, personalia, dan keuangan diharapkan akan mampu menepatkan setiap keputusan secara jauh lebih bijaksana. Banyak persoalan lainnya yang berkaitan dengan keuangan. Seperti bagian pemasaran harus melihat setiap keputusan bisa mempengaruhi keputusan keuangan.

Kondisi ini juga termasuk pada bagian personalia. Jika manajer personalia mengusulkan agar ada kenaikan gaji karyawan sementara kualitas kinerja yang dihasilkan adalah tidak sesuai seperti yang diharapkan maka artinya keputusan manajer personalia hanya bersifat sepihak, tanpa memikirkan sisi yang lainnya. Karena konsep dan filosofi keuangan adalah berusaha menciptakan keseimbangan dalam setiap keuangan. Jumlah pemasukan harus sama dengan jumlah pengeluaran, jika tidak berimbang maka itu adalah sebuah persoalan.

E. Tujuan manajemen keuangan

Ada beberapa tujuan dari manajemen keuangan yaitu:

- a. Memaksimumkan nilai perusahaan
- b. Menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali
- c. Memperkecil resiko perusahaan dimasa sekarang dan akan datang.

Dari tiga tujuan ini yang paling utama adalah yang paling utama adalah yang pertama yaitu memaksimumkan nilai perusahaan. Pemahaman memaksimumkan nilai perusahaan adalah bagaimana pihak manajemen

perusahaan mampu memberikan nilai yang maksimum pada saat perusahaan tersebut masuk ke pasar.²¹

1. Kegunaan laporan

keuangan Laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Bahwa laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktifitas atau perusahaan tersebut. Sehingga laporan keuangan memegang peranan yang luas dan mempunyai suatu posisi yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

Standar akuntansi keuangan memberikan pengertian tentang laporan-laporan keuangan yaitu, Ikatan Akuntansi Indonesia Menjelaskan bahwa “ laporan keuangan ialah neraca dan perhitungan laba laporan perubahan posisi keuangan (misalnya, laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Menurut Munawir “ Laporan keuangan merupakan salah satu informasi keuangan yang bersum intern perusahaan yang bersangkutan.” Bahwa laporan keuangan utama meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan aliran kas serta footnotes (merupakan bagian integral dari laporan keuangan). Lebih jauh munawir mengatakan “ pihak-pihak yang menginvestasikan modalnya membutuhkan informasi tentang sejauh mana menginvestasikan modalnya membutuhkan

²¹ Ibit

informasi tentang sejauh mana kelancaran aktivitas dan profitabilitas perusahaan, potensi deviden, karena dengan informasi tersebut pemegang saham dapat memutuskan untuk mempertahankan sahamnya, menjual atau bahkan menambahnya”.

Dapat dipahami bahwa dengan adanya laporan keuangan yang disediakan oleh pihak manajemen perusahaan maka sangat membantu pihak pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan. Seperti keinginan perusahaan untuk melakukan right issue. Right Issue artinya penjualan saham yang diprioritaskan kepada pemilik saham lama untuk membelinya. Sehingga berdasarkan data laporan keuangan yang diperoleh dan tersajikan, maka investor atau pemilik saham perusahaan akan bisa menganalisis sebagaimana kondisi perusahaan serta prospek perusahaan nantinya khususnya dari segi kemampuan profitabilitas dan deviden yang akan dihasilkan.

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwasanya laporan keuangan dapat sangat berguna dalam melihat kondisi suatu perusahaan, baik kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai untuk prediksi untuk kondisi di masa yang akan datang (forecast analyzing).

2. Tujuan laporan keuangn

Tujuan laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi atau perusahaan dari sudut angka-angka dalam suatu moneter. SFAC No. 1 menyatakan tujuan dari pelaporan keuangan perusahaan yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi

pembuatan keputusan bisnis dan ekonomis oleh investor yang ada dan yang potensial, kreditor, manajemen, pemerintah, dan pengguna lainnya.

Menurut Standard “ tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.” Adapun tujuan laporan keuangan menurut PAPI (pedoman Akutansi perbankan indonesia). Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja perubahan akuitas, arus kas dan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Dengan diperolehnya laporan keuangan, maka diharapkan laporan keuangan bisa membantu dalam tujuan untuk menghindari analisis yang keliru dalam melihat kondisi perusahaan. Dimana Farid Hariantoda Swiswanto Sodom, mengataka tujuan laporan keuangan agar pembuatan keputusan tidak menderita kerugian atau paling tidak mampu menghindarkan kerugian yang lebih besar, semua keputusan harus didasarkan pada informasi yang lengkap, reliable, valid, dan penting.

Adapun tujuan dari laporan keuangan menurut standar akutansi keuanga adalah: Meyediakan informasi yang menyangkut posisi keuanagn, kinerja serta perubahan posisi keuangan atau perubahan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai pengambil keputusan ekonomi. Dalam laporan keuangan dibuat dan disusun oleh akuntan. Para akuntan memahami dengan benar bahwa laporan

keuangan yang dibuat tersebut akan menjadi informasi keuangan bagi banyak pihak. Oleh karena itu, seorang akutan harus memahami dengan benar tujuan suatu pelaporan keuangan.

Menurut Skouse, Sice, dan Sttice bahwa, “tujuan pelaporan keuangan yang diungkapkan didalam rangka konseptual adalah:

- a. Kegunaan
- b. Dadapat dipahami
- c. Target audiens: investor dan krediator
- d. Penilaian arus kas masa yang akan datang
- e. Mengevaluasi sumber daya ekonomi
- f. Fokus primer pada laba

F. Jenis-jenis laporan keuangan

Menurut Warsono (2001:25) ada 2 macam bentuk laporan keuangan utama yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yaitu Neraca dan laporan laba rugi.

1. Neraca

Menurut Warsono (2001:25), neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi pada suatu periode tertentu. Neraca perusahaan ini disusun berdasarkan persamaan dasar akuntansi, yaitu kekayaan atau aktiva (aset) sama dengan kewajiban (liabilites) ditambah modal saham (stock equisties)

2. Laporan laba rugi

Menurut Wrsono (2001:25), laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil-hasil usaha yang dicapai selama periode

tertentu. Laba rugi bersih adalah selisih antara pendapatan total dengan biaya atau pengeluaran total. Pendapatan mengukur aliran masuk aset bersih setelah dikurangi utang dari penjualan barang atau jasa.

3. Laporan Arus Kas

Adalah kas tahunan dari operasi, arus kas dihitung melalui penyusuaian laba bersih sebelum pos luar biasa terdapat dipresiasi, pajak pajak ditangguhkan perubahan bukan kas pada current aset dan perubahan hutang lancar yang berasal dari hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo. Arus kas dibagi yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk terdiri dari penerimaan yang berupa kas, dan pengeluaran kas untuk membiayai operasi perusahaan. Laporan arus kas menginformasikan perubahan dalam posisi keuangan sebagai akibat kegiatan usaha, pembelajaran, dan investasi selama periode yang bersangkutan.

G. Karakteristik Laporan Keuangan

Terdapat empat karakteristik yaitu: relevan, keandalan dan dapat dibandingkan. Adapun penjelasannya adalah:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Dalam hal ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktifitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta

keamanan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar. Namun demikian, informasi komplek yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan.

3. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja perusahaan.

H. Fungsi Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disusun oleh kepada semua pihak yang berkepentingan dengan eksistensi suatu perusahaan, pada hakekatnya merupakan alat komunikasi. Artinya laporan keuangan itu adalah suatu alat yang digunakan mengkomunikasikan informasi dengan perusahaan tersebut.

Menurut Hermanto, dalam bukunya “ Analisis Laporan Keuangan” bahwa dari laporan keuangan maka manajemen dapat memperoleh informasi yang berfungsi yaitu:

- a. Merumuskan, melaksanakan dan mengadakan penilaian terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu.
- b. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan atau aktivitas dalam kegiatan
- c. Merencanakan dan mengendalikan kegiatan atau aktivitas sehari-hari dalam kegiatan
- d. Mempelajari aspek, tahap-tahap kegiatan tertentu dalam perusahaan.²²

Disamping fungsi laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat pertanggung jawaban manajemen kepada semua pihak yang menambahkan dan mempercayai pengelola adanya dalam perusahaan tersebut terutama kepada para pemilik. Melalui laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan, maka ada dua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut, yaitu:

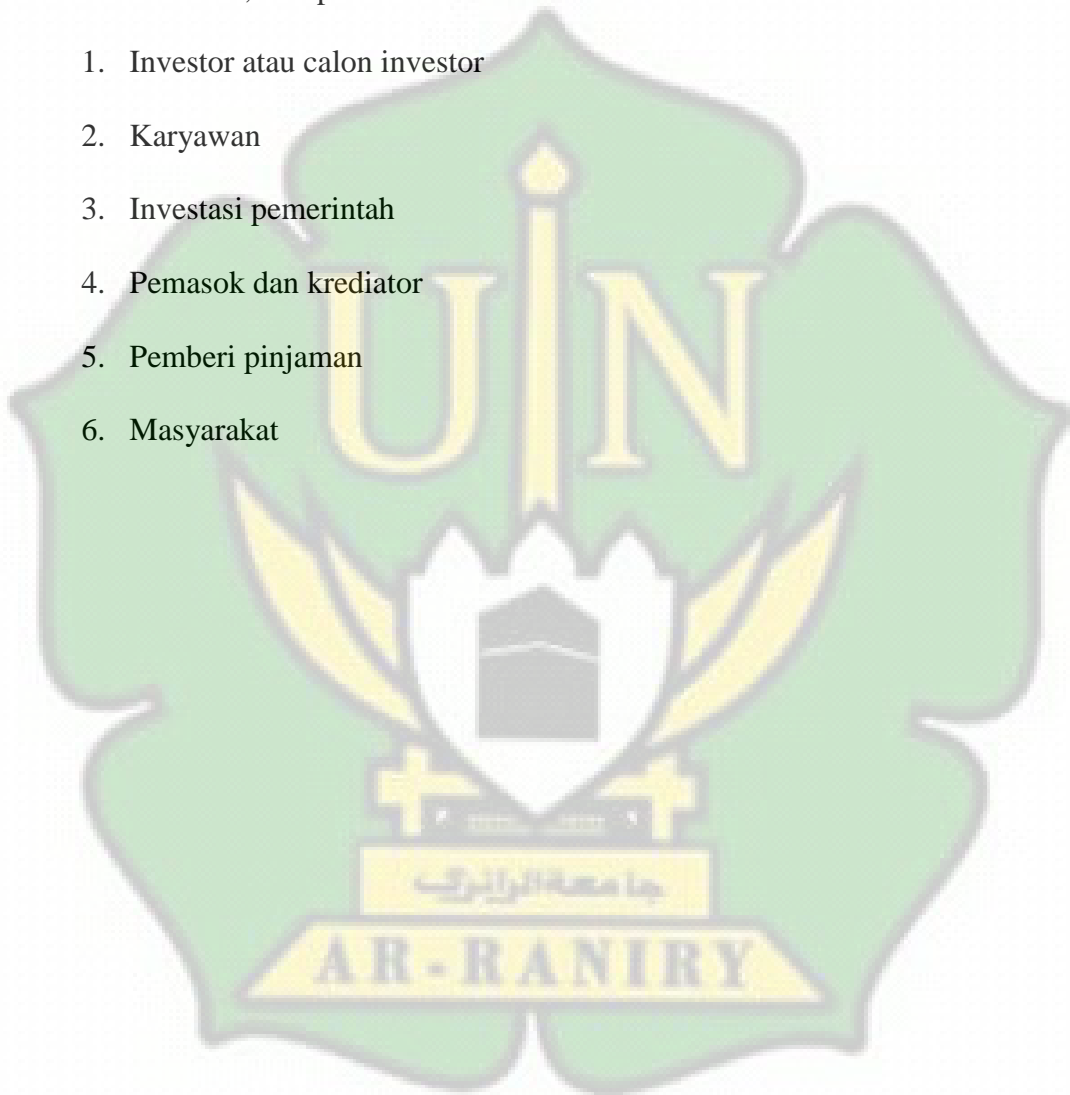
²² Hermanto, Analisis Laporan Keuangan (2001), hal 11

a. Pihak Intern, meliputi:

1. Pemilik perusahaan
2. Manajemen perusahaan

b. Pihak Ekstern, meliputi:

1. Investor atau calon investor
2. Karyawan
3. Investasi pemerintah
4. Pemasok dan krediator
5. Pemberi pinjaman
6. Masyarakat



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, maupun lisan dan perilaku orang yang diteliti.²³ Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan data lapangan menganalisa secara menarik kesimpulan dari kata tersebut. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang diteruskan oleh Mohd Nazir menyatakan bahwa, “ Metode deskriptif”, penulisan atau lukisan secara sistematis, faktual akurat fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁴

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Meleong “Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.²⁵ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran-kebenaran. Usaha untuk mengejar kebenaran dilakukan oleh peneliti melalui model yang biasanya dikenal dengan paradigma karena paradigma

²³ Nurul Zuriah, Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta : PT Bumi Askara, 2009), hlm 47

²⁴ Mohd Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm, 65

²⁵ Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), hlm, 4

tersebut berkedudukan sebagai landasan berpijak atau fondasi dalam melakukan proses penelitian.²⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian dalam penulisan ini skripsi ini dilakukan di Gampong Sapek Kecamatan Setia Bakti. Dalam melakukan penelitian ini sangat diperlukan metode yang benar-benar sesuai dengan objek yang hendak diteliti. Merupakan cara mengerjakan sesuatu agar kegiatan penelitian dapat dilakukan secara rasional untuk menepati hasil yang terbaik. Dalam penelitian kualitatif, penelitian sebagai instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, dan memilih sebagai sumber data.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “dibalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, analisi data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.²⁷

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi

²⁶ Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma baru..., hlm, 146

²⁷ Sugiyono, Memahami Peneliti Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm, 22

dan wawancara. Peneliti akan terjun kelapangan sendiri melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.²⁸

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai alat peka dapat beraksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna atau tidak bagi peneliti. Dalam pelaksanaan penelitian maka penelitian akan hadir dilapangan, yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian pada waktu yang dibutuhkan. Peneliti akan terus hadir dilokasi sampai diperoleh kesimpulan yang dimusyawarahkan dan disepakati oleh informasi yang menjadi sumber data.

D. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari mana data-data diperoleh. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data pertama dimana data dihasilkan. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah data primer²⁹. data primer dan data sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu pemerintah gampong Sapek dan masyarakat gampong Sapek. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan informan yang telah ditentukan yaitu

²⁸ Ibit, hlm, 22

²⁹ Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: Air Langga University Press, 2001). Hlm, 129

pemerintah gampong Sapek denganberpedoman pada Qanun Nomor 4 Tahun 2018 tentang pemerintahan Gampong. Informan dalam penelitian ini ada 6 yaitu:

- a. Keuchik Gampong Sapek. Peneliti memilih Keuchik sebagai informan karena keuchik merupakan orang yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pemerintahan Gampong Sapek yang dibantu oleh peraturan....
- b. Bendahara Gampong Sapek: peneliti memilih Bndahara sebagai informan karena bendahara yang bertugas mengatur dan mengelola keuangan.
- c. Sekretaris Gampong Sapek : peneliti memilih Sekretaris sebagai informan karna sekretaris yang bertugas membantu Kepala Desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d. Masyarakat Gampong Sapek: peneliti memilih masyarakat Gampong Sapek sebagai informan karena masyarakat Gampong Sapek berhak menilai plaksanaan pengelolaan dana desa.
- e. Ketua PPK Gampong Sapek: peneliti memilih Ketua PPK sebagai informan karena ketua pkk bertugas untuk memotivasi, membimbing, dan membina TP PPK di bawahnya secara berjenjang serta kadernya agar lebih berdaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tulisan ilmiah atau studi kepustakaan dan dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari

beberapa dokumen yang mendukung hasil penelitian seperti Undang-Undang peraturan menteri, serta Qanun kota Calang tentang pemerintahan an gampong.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Dalam pengumpulan data pasti ada teknik yang digunakan sesuai dengan perolehan yang dilakukan.³⁰

Dalam pengumpulan data dilapangan penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian.³¹ Dalam hal ini, peneliti perlu mengunjungi lokasi penelitian agar mengamati berbagai hal atau kondisi yang ada dilapangan. Dalam penelitian observasi penulis mengadakan pengamatan langsung kelokasi penelitian di Kantor Camat Setia Bakti. Untuk mengetahui langsung berbagai bentuk Pola Pembinaan Administrasi bagian Keuangan (bendahara) di Gampong Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya.

³⁰ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm, 222,234

³¹ Nurul Zuriah, metode pendidikan sosial dalam pendidikan teori-aplikasi, (jakarta: Bumi Askara, 2009), hlm 50

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dua orang lebih dengan tatap muka antara pewawancara dan informan. Untuk memperoleh data yang lebih valid penulis melakukan dialog langsung dengan informan, penelitian ini dilakukan dibagian urusan keuangan bendahara.

Peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data yang di proses dari hasil observasi lapangan, sehingga hasil yang didapatkan dari observasi dan wawancara menjadi berkesinambungan.³²

Dalam penelitian ini yang akan diwawancara berjumlah tiga orang antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jumlah Implomen yang di Wawancara

No	Nama	Jabatan
1		Camat Setia Bakti
2	Azwar	Keuchik Gampong Sapek
3	Izhar, S.E	Bendahara Gampong Sapek
4	Zulfikar, SKM	Sekretaris Gampong Sapek

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode mengumpulkan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relavan seperti buku-buku, jurnal, artikerl ilmiah, majala,

³² Nurul Zuriah, metode penelitian dan pendidikan teori-aplikasi, hlm 57

dokumen pribadi ataupun dokumen resmi.³³ Pada penelitian ini, dokumentasi yang digunakan berupa Undang-Undang yang terkait dengan judul penelitian. Dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumentasi sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan.³⁴ Pelaksanaan teknik dokumentasi dalam hal ini adalah penulis mengumpulkan dokumen yang dapat mendukung data hasil observasi dan wawancara yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.³⁵ Analisis data juga merupakan serangkaian kegiatan penelaah, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.³⁶

Tujuan dari analisis data adalah untuk meningkatkan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara pobleem penelitian dapat dipahami dan di uji. Didalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptis yaitu suatu metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan dilakukan dengan proses penelaahan,

³³ Suharmisi Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 274.

³⁴ Meoleong, *Metodelogi Penelitian*. Hlm, 217

³⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Selemba Humanika, 2012), hlm. 158.

³⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hlm. 69.

pengurutan, dan pengelompokan data untuk menarik kesimpulan proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menumpuh bberapa langkah, kemudian hasilnya akan disimpulkan.

Adapun Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Redukksi data

yaitu dimana data yang sudah terkumpul lalu diolah dan dimasukkan kedalam katagori tertentu untuk mengetahui kinerja terhada pola pembinaan Adminisrtasi keuangan di Gampong Kecamatan Setia Bakti.

2. Penyajian Data (Dislay Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat disajikan dalam bentuk grafik, label, pictogram. Penyajian data juga bisa dituangakan dalam bentuk uraian singkat, bagan atau semacamnya. Sehingga apabila peneliti menemukan data yang baru, asing ataupun tidak jelas, maka itulah yang harus dijadikan pusat perhatian dalam mereduksi data.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-buktinya. Namun bilang kesimpulan telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelanpangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang keredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tapi mungkin juga tidak, karna masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan

berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang digarapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa desriptis atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Tujuan data yang diperoleh akan akan dibahas melalui metode deskriptif analisis, karena dengan metode ini akan dapat menggambarkan semua data yang diperoleh serta dideskripsikan dalam bentuk tulisan dan karya ilmiah. Dengan menggunakan, metode ini seluruh kemungkinan yang didapatkan dilapangan dapat secara lebih luas. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis terlebih dahulu erhadap fakta dilapangan sehingga akan memberikan jawaban tentang bagaimana Pola Pembinaan Administrasi Bagian Keuangan Gampong Di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya.

Kesimpulan dalam analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman secara esensial berisi tentang uraian seluruh subkatagori tema, langkah terakhir yang harus dilakukan adalah membuat kesimpulan dari temuan hasil penelitian dengan memberikan penjelasan atau kesimpulan dari jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Gampong Sapek

Gampong Sapek merupakan suatu gampong dari 13 gampong yang berada di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya. Jarak antara gampong dan kecamatan 14 km. Jarak dari Ibu kota kabupaten/kota 28 km dengan luas pemukiman 4000 Ha. Jumlah penduduk 671 jiwa.³⁷

Asal mula Gampong Sapek bermula dari Teuku Kuta Bate membuka lahan untuk kegiatan perkebunan dan pertanian. Seiring berjalanya waktu area tersebut dipenuhi oleh masyarakat yang ingin berkebun dan berkompromi untuk memberi nama kampung tersebut. Banyak ditumbuhi pohon jenis “ Sape” sehingga masyarakat gampong Sapek menyebut sebagai Gampong Sapek hingga sampai sekarang.³⁸

1. Letak Geografis

- a. banyak curah hujan : Sedang
- b. ketinggian tanah dari permukaan laut : 1 Meter
- c. topografi (dataran rendah) : Dataran Rendah
- d. suhu udara rata-rata : Sedang

Kadaan iklim Gampong Sapek sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia yang mempunyai iklim tropis dan terbagi dua musim yaitu musim basah (hujan) dan musim kering (kemarau).

Adapun batas-batas wilayah Gampong Sapek adalah sebagai berikut:

³⁷ Profil Gampong Sapek Tahun 2021

³⁸ Ibit

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Padang

Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Pante Kuyun dan Glee Subak

2. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Gunong Meunasah dan Paya Laoet
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lhok Timon³⁹

Urutan pemimpin pemerintah Gampong Sapek atau Keuchik menurut informasi para ketua Gampong sejak dari mulai pertama Gampong Sapek menjadi suatu wilayah Gampong sampai dengan tahun 2019 sampai sekarang.

Tabel 3.2 Sejarah Pemerintah Gampong

No	Nama Keuchik	Nama Sekritaris	Masa Jabatan
1	Musa	Wakil Ibrahim dan Waki Basah	1947 s/d 1950
2	Sehan	Waki Ali dan Waki Maddem	1951 s/d 1966
3	Ismail	Tgk.M.Husen dan Rami Ak	1966 s/d 1990
4	Nasrun Syah	Armia.Ls	1986 s/d 1990
5	Idram	Armia. Ls, Amiruddin dan Azma	1990 s/d 2007
6	Muntashar	Azman	2007 s/d 2016
7	Izwar	Azman	2016 s/d 2019
8	Ahyar	Izhar,S.HI..	2019 s/d sekarang

³⁹ Profil Gampong Sapek Tahun 2019-2020

Jarak Gampong Sapek dari pusat kota Calang Aceh Jaya 28 km dan dari Pusat Pemerintahan Kecamatan 14 km. Hal ini memudahkan masyarakat sekitar untuk melakukan aktifitas sehari-hari baik administrasi maupun aktifitas ekonomi masyarakat yang mudah dijangkau.

Gampong Sapek terletak di daerah pinggiran Gunung dengan posisi Gampong yang terletak didalam kawasan perkampungan serta perkebunan yang memiliki sungai serta yang menjadi salah satu sumber daya tarik tersendiri dengan wilayah lain. Gampong Sapek terdiri dari 5 dusun yaitu : Dusun Cot Situi, Dusun Cot Masjid, Dusun Lamteungoh, Dusun Laksana, Dusun Rambong Raya. Dalam satu kepala gampong dibantu oleh seorang sekretaris gampong, seorang imam gampong dan tuha peut gampong serta dibantu oleh perangkat staf bidang kebutuhan administrasi di gampong.

3. Visi dan Misi Gampong Sapek

Visi:

Visi Gampong Sapek adalah terciptanya Gampong Sapek yang aman, tentram, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan berlandaskan nilai-nilai syariat islam dan menjadikan Gampong Sapek sebagai pusat⁴⁰.

Misi

1. Memastikan pelaksanaan syariat islam yang baik
2. Menyelenggarakan pemerintahan Gampong Sapek yang profesional
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan

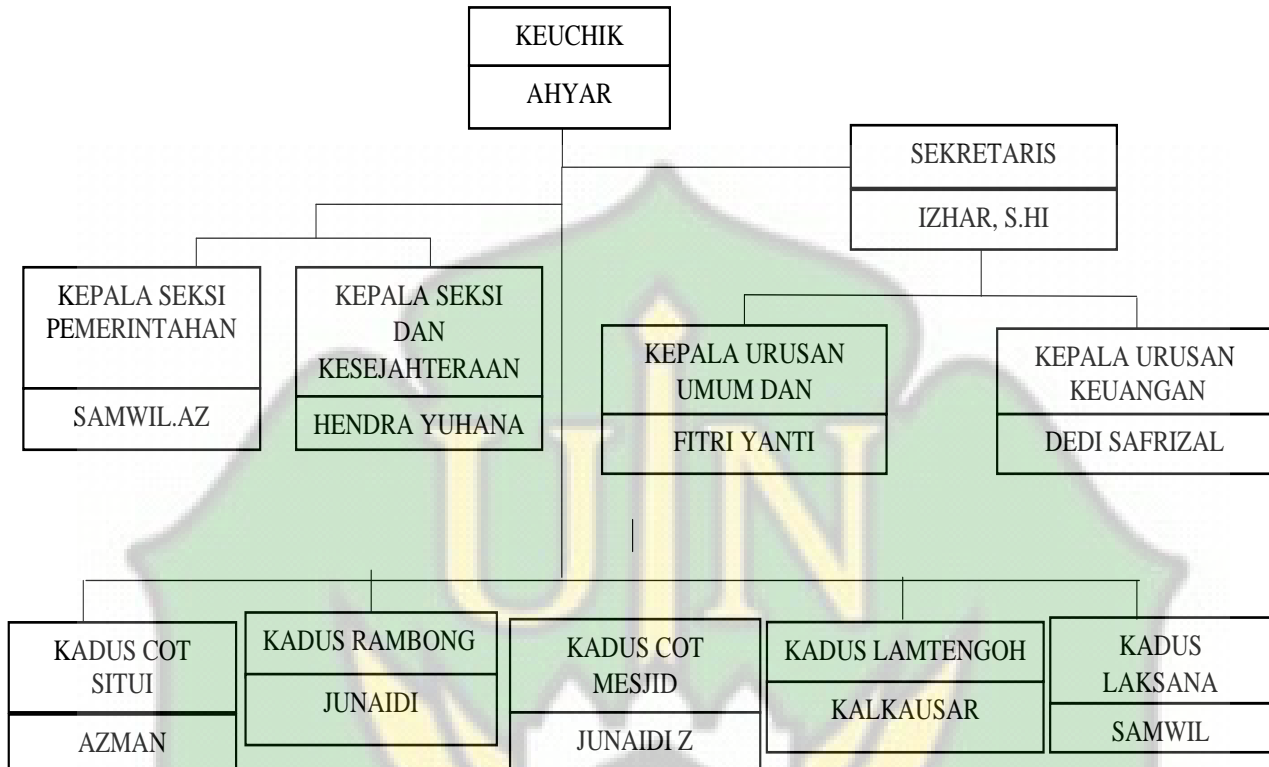
⁴⁰ Data Visi dan Misi desa tahun 2019-2025

4. Mendukung penanaman modal badan usaha gampong (BUMG)
5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak
6. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan di gampong
7. Membenumbuhkan dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat dengan mengoptmalkan potensi yang dimiliki baik sektor pertanian, perikanan dan industri berskala rumah tangga.

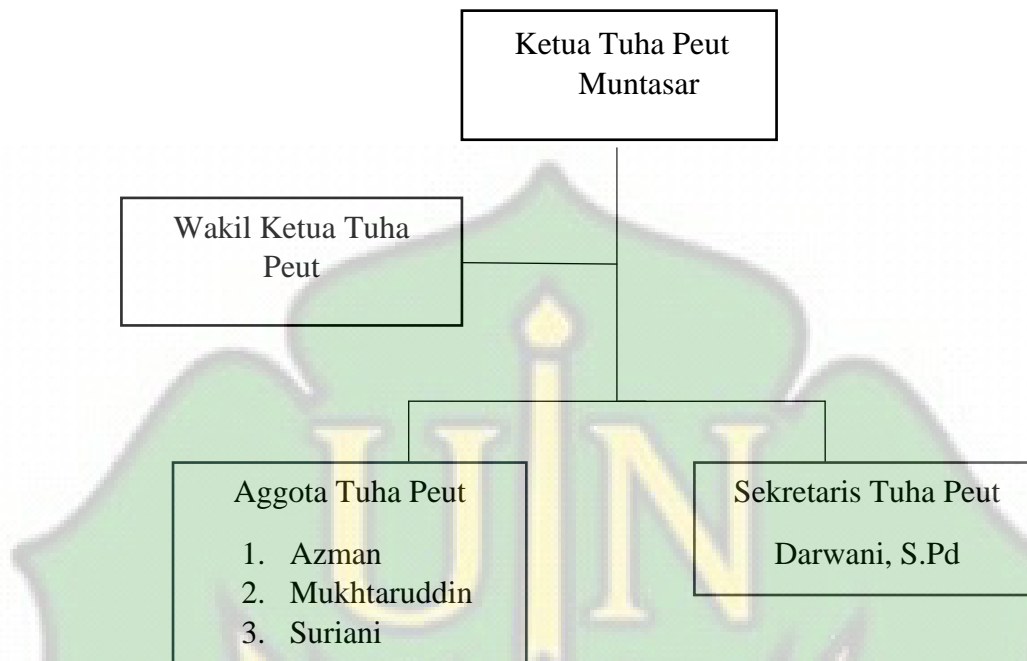
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Sapek

Dalam sebuah gampong dibutuhkan sebuah pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan gampong. Struktur pemerintahan gampong terdiri dari beberapa tingkatan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat setempat berdasarkan undang-undang demi mewujudkan pembangunan pemerintah di wilayah gampong tersebut. Setiap gampong dikepalai oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh jajaran perangkat gampong yang memiliki tugas masing-masing dalam mengurus setiap keperluan gampong, dengan pembagian tugas tersebut diharapkan setiap jajaran perangkat 15 gampong dapat memaksimalkan kinerja.

Gambar 4.1 Sruktur Organisasi Pemerintahan Gampong Sapek



Gambar 4.2 Struktur Tuha Peut Gampong



a. Masalah/isu strategis yang dihadapi gampong

Sesuai hasil pada forum Musrembang dalam upaya mengegas masa depan Gampong untuk 5 (lima) tahun ke depan, dapat diidentifikasi 4 (empa) isu/ permasalahan Gampong yang *di rangking* berdasarkan jumlah masukan yang terbanyak peserta musyawarah, tingakat kemampuan gampong yang didasarkan atas kondisi, eksistensi serta dampak positif yang ditimbulkan akibat pembangunan tersebut.

Keempat permasalahan tersebut dikelompokkan ke bidang-bidang sebagai tersebut:

1. Sektor Infrastruktur (sarana da prasarana)
2. Sosial Budaya
3. Ekonomi

4. Pelayanan Umum

Dari beberapa sektor tersebut ada beberapa masalah yang sangat mendasar dan perlu penanganan yang baik di Gampong Sapek.

- 1) Pada umumnya masyarakat Gampong Sapek hampir 95% merupakan petani, masih minimnya akses transportasi dalam mengambil hasil pertanian dan menuju ke lokasi persawahan.
- 2) Belum memadai dan mencukupi saluran irigasi untuk peningkatan hasil pertanian warga masyarakat Gampong Sapek.
- 3) Beberapa wilayah pemukiman warga tergenang banjir disaat musim hujan tiba, hal ini dikarenakan belum adanya Normalisasi Sungai Lageun, sehingga kondisi ini bisa selain menggenangi perumahan juga dapat menimbulkan dampak lain seperti wabah penyakit.
- 4) Masih kurangnya keterampilan dalam menjalankan pengelolaan manajemen aparatur, baik dalam segi surat-menyurat maupun dalam segi pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik, sehingga hal ini dapat di khawatirkan akan menurunkan motivasi dan kinerja aparatur Gampong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di perlukan pelatihan aparatur Gampong.

5. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Setia bakti pada tahun 2018 adalah gampong Sapek 671 jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut, gampong sapek membutuhkan perencanaan dan tata ruang yang bagus dalam peningkatan

kualitas hidup melalui tempat tinggal tempat kerja, kemudahan transportasi serta kemudahan dalam memperoleh kebutuhan.

a. Kondisi Sosial

Sebelum konflik tatanan kehidupan masyarakat gampong sapek sangat kental dengan sikap soladiritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang berbaur sosial kemasyarakatan sangat berjalan dan dipelihara. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat dimana-mana agama islam memang sangat ditetankn untuk saling berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya dan dituntut pula untuk membina ukhwah islamiah antar sesama.

Masyarakat pada umumnya juga sangat berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti goto-royong pekerjaan jalan, membersihkan mesjid, dan yang bersifat silaturahhmi seperti hajatan, khanduri dan thakziah. Dalam rangka kegiatan keagaman seperti, mengadakan warid yasin yang dilakukan, mengadakan wirid yasin yang dilakukan setiap hari jumat bagi kaum hawa, dan mengadakan MTQ tingkat gampong, masyarakat gampong saling tlong-menolong dalam proses pelaksanaan kegiatan yang diatas:

Tabel 3.3 Kelompok Sosial Masyarakat

No	Nama Kelompok	Sruktur Organisasi	Kegiatan
1.	Wirit Yasin	Ketua :Jasni Abdullah Sekritaris :Yusma Wati Berdahara :Aswilizar	Setiap hari jumat dan saat khanduri dirumah masyarakat

2.	Dalil Khairat	Ketua :Sukardi Wakil :Suheri	Setiap hari jumat
3.	PKK	Ketua :Aawilizar Sekretaris :Nurbaiti Bendahara :	Menjalankan 10 program pokok kegiatan pkk

Tabel 3.4 Jumlah penduduk berdasarkan umur

A	Jumlah kepala keluarga	:	199	Kk
B	Jumlah laki-laki	:	339	Orang
1.	0 – 12 bulan	:	4	Orang
2.	> 1 - < 5 tahun	:	17	Orang
3.	$\geq 5 - < 7$ tahun	:	9	Orang
4.	$\geq 7 - \leq 15$ tahun	:	54	Orang
5.	>15 – 56 tahun	:	207	Orang
6.	>56 tahun	:	31	Orang
C.	Jumlah Perempuan	:	332	Orang
1.	0 – 12 bulan	:	2	Orang
2.	> 1 – 5 tahun	:	26	Orang
3.	$\geq 5 - < 7$ tahun	:	11	Orang
4.	$\geq 7 - \leq 15$ tahun	:	56	Orang
5.	> 15 – 56 tahun	:	184	Orang
6.	> 56 tahun	:	37	Orang

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

1.	Jumlah penduduk buta huruf	:	29	Orang
2.	Jumlah penduduk tidak tamat SD/MIN	:	25	Orang
3.	Jumlah penduduk taman SD/MIN	:	226	Orang
4.	Jumlah penduduk tamat SLTP/MTsN	:	68	Orang
5.	Jumlah penduduk tamat SMU/MAN	:	99	Orang
6.	Jumlah penduduk tamat D-1	:	1	Orang
7.	Jumlah penduduk tamat D-2	:	4	Orang
8.	Jumlah penduduk tamat D-3	:	15	Orang
9.	Jumlah penduduk tamat S-1	:	26	Orang
10.	Jumlah penduduk tamat S-2	:	0	Orang
11.	Jumlah penduduk tamat S-3	:	0	Orang

Tabel 3.6 Jumlah penduduk berdasarkan Jender

1.	Jumlah penduduk	:	671	Orang
2.	Jumlah laki-laki	:	339	Orang
3.	Jumlah perempuan	:	332	Orang
4.	Jumlah janda	:	38	Orang
5.	Jumlah duda	:	9	Orang
6.	Jumlah anak yatim	:	1	Orang
7.	Jumlah fakir miskin	:	45	KK

6. Mata Pecaharian Gampong Sapek

Sedikitnya penduduk gampong sapek yang berprofesi sebagai pemerintahan, pegawai swasta, dan juga sebagai tenaga jasa dan buruh tani, hal ini karena letak geografis gampong sapek yang berada di pinggirang gunung dilihat dari potensi ekonomi, wilayah di gampong sapek sangat strategis untuk perkembangan sektor perkebunan dengan luas 300 Ha, peternakan, jual beli sembako, pertukangan, letak gampong sapek juga strategis dengan perdangan.

Tabel 3.7 Mata Pencaharian Gampong Sapek

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	25	15	40
2	Pekebun	10	5	15
3	Pedagang	7	2	9
4	Pns	6	5	11
5	Buruh harian	10	3	13
	Jumlah	58	30	88

Dari data diatas dapat diketahui bahwa mata pencarian penduduk gampong Sapek pada umumnya adalah petani, dan hanya sebagian kecil saja yang bermata pencarian sebagai pedagang, buruh harian, dan lainnya.

7. Program Kerja Gampong Sapek

Adapun program kegiatan yang dilakukan di Gampong Sapek adalah sebagai berikut:

- a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Penyelenggaraan pemerintahan Gampong Sapek tahun 2020 akan difokuskan untuk menangani dokumen yang dibutuhkan gampong, menyusun profil gampong, serta untuk pembayaran belanja pegawai beserta operasional perkantoran dan pembiayaan untuk penyelenggaraan peraturan-peraturan gampong.

Antara lain adalah:

1. Penghasilan tetap keuchik dan aparatur
 2. Tunjangan dan Honor perangkat gampong
 3. Tunjangan dan honor tuha peut
 4. Operasional perkantoran
 5. Operasioanal Dusun
 6. Penyusunan RPJMG, RKPG dan APBG
 7. Penyelenggaraan musyawarah Gampong
 8. Perencanaan pembangunan gampong
 9. Pengembangan profil gampong
 10. Pendapatan Potensi gampong
- b. Bidang Pembangunan

Dalam melakukan terhadap perubahan perlu adanya pembangunan dalam gampong baik pembangunan fisik maupun non fisik berupa pembangunan sarana transportasi, pembangunan sarana kesehatan (posyandu), pembangunan sarana keamanan, pembangunan sarana pendidikan (TK dan TPA), pembangunan sarana olahraga, dan pembagunan sarana publik (wc). Selain itu, pemerintah Gampong Sapek juga melakukan penyuluhan kepada para petani/peretnaks yang ada di Sapek,

mengatur mengairan air terhadap sawah ketika musim kemarau tiba, dan juga membina dan menoptimalkan kelompok tani secara optimal. Hal ini dilakukan kerana sebagai besar penduduk Sapek berfropesei sebagai petani. Sedangkan pembangunan non fisik berupa pembangunan akhlak. Pembangunan akhlak diarahkan untuk menjadi manusia yang ber-akhlakul qarimah dengan membentuk tempat pengajian diskusi keagamaan. Adapun kegiatan yang terprioritas dalam tahun 2020 merupakan sebagian berikut (disesuaikan dengan kegiatan APBG tahun 2020):

1. Lanjutan rehap paud
2. Peningkatan jalan Cot Situi- Rambog Raya 800 m²
3. Pembangunan Box Culvert 1 unit
4. Peningkatan/penggerasan jalan usaha tani Dusun Laksana 1000 m²
5. Pembangunan Rumah Layak Huni 2 unit
6. Pembangunan MCK kantor Keuchik

Dalam pembangunan roda pemerintahan gampong, maka tiada lepas dari kegiatan-kegiatan keagamaan, dan pendidikan usia dini yang ada dalam Gampong Sapek, sehingga membutuhkan tenaga kerja yang menjalankan kegiatan tersebut.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat tahun 2020, pemerintah Gampong Sapek tidak jauh berbeda dengan tahun 2019 tentang memfokuskan meberdayakan perangkat dan lembaga lainnya yang ada digampong sapek melalui pelatihan perangkat gampong, pelatihan tuha peut, pelatihan tim penyusuna RPJMG dan RKP, pelatihan pengurus BUM, pelatihan PT-

PKG dan pelatihan komputer aparatur gampong, sehingga Gampong Sapek akan melahirkan aparatur yang pandai dan handal, maka dari itu kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

1. Penyertaan Modal Desa BUMG
2. Insentif pengelola posyandu dan kader Desa siaga
3. Pengelolaan Paud Gampong
4. Operasional Paud.

8. Sarana dan Prasarana Gampong Sapek

Berikut ini beberapa sarana dan prasarana di Gampong Sapek Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya adalah:

Tabel 3.8 Jenis Sarana dan Prasarana Gampong Sapek

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (unit)	Pengunaan
1	Gedung pemerintah	2 Unit	Polindes
		1 unit	Balai Gampong
2	Fasilitas Ibadah/Agama	2 unit	Masjid
		2 unit	Meunasah
3	Fasilitas pendidikan	1 unit	Paud
		3 unit	TPA
		1 unit	Sekolah Dasar
		1 unit	SMP
4	Fasilitas Olah Raga	1 unit	Lapangan Bola Volly Lapangan Bola Kaki

B. Mekanisme Administrasi Keuangan (Bendahara) Gampong

Menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai amandemen dari pemendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Qanun Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintah Gampong. Sesuai dengan peraturan tersebut, pengelolaan keuangan gampong meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Keuangan Gampong menurut Qanun Nomor 1 Tahun 2019 menjelaskan semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan dan hak kewajiban Gampong. Keuangan gampong tertuang dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG. APBG merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah gampong yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah gampong yaitu Keuchik dan Tuha Peut Gampong.

Mekanisme pengelolaan keuangan Gampong Sapek dimulai dengan pembentukan Tim penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) yang dibuat oleh pemerintah gampong seperti tim pengawasan, tim koordinasi, tim pelaksanaan yang melibatkan Keuchik sebagai pembina, Sekretaris, Bendahara, dan lembaga-lembaga lain yang ada di gampong. Pembentukan dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat gampong. Seperti wawancara dengan Keuchik Gampong Sapek.

“Untuk langkah awal perangkat desa membentuk tim terlebih dahulu sebelum adanya musyawarah dusun (mudus), musyawarah gampong dan musrenbang. Tentunya pembentukan tim ini terdiri dari beberapa

perangkat gampong kemudian ada juga perwakilan dari lembaga-lembaga gampong.”⁴¹

Mekanisme pembentukan tim penyusunan RKPG yang dibuat oleh Pemerintah Gampong Sapek telah sesuai dengan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang terdapat pada pasal 33 mengenai pembentukan tim penyusun RKPGDes dan sesuai dengan Qanun Aceh Jaya Nomor 32 Tahun 2015 dalam BAB IV Pasal 59 tentang perencanaan Pembangunan Gampong. Tujuan pembentukan tim sebelum adanya musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah agar forum musyawarah lebih terarah dan tim penyusunan RKPG menjadi penengah apabila terdapat usulan dan keinginan program prioritas yang diminta masyarakat. Selanjutnya tim tim RKPG tersebut menyalurkan usuln tersebut dengan peraturan-peraturan yang berlaku maupun dari RPJMG (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong).

C. Perencanaan Pembangunan Masyarakat Gampong Sapek

Berdasarkan Qanun Nomor 1Tahun 2009 Pasal 64 tentang keuangan Gampong dijelaskan perencanaan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk tahun anggaran yang akan datang. Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan, yang dihasilkan dari masing-masing kegiatan tersebut. Dalam menyusun program yang akan dilaksanakan, pemerintah gampong harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan peningkatan perekonomian masyarakat.

⁴¹ Wawancara dengan Keuchik Gampong Sapek pada Tanggal 29 Juli 2021.

Proses perencanaan pembangunan tersebut tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPG). RKPG ini akan menentukan arah pembangunan gampong dalam jangka waktu satu tahun kedepan dimana proses penyusunannya harus berdasarkan fokus perencanaan perencanaan pemerintah gampong yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Gampong (RPJMG). RPJMG dan RKPG akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan gampong untuk penyusunan APBG yang diatur melalui peraturan gampong yang disesuaikan dengan program pemangunan pemerintah kota, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Mengingat pentingnya RKPG tersebut, dibutuhkan peran dari pemerintah gampong untuk dapat merancang apa saja menjadi prioritas pembangunan setahun kedepan dan tentunya harus sesuai dengan aspirasi masyarakat dan cakupan dana yang tersedia. Seperti wawancara dengan Keuchik Gampong Sapek menjelaskan program mekanisme penyusunan RKPG:

“ Semua di undang kemudian direncanakan kalau semuanya sudah tersentuh baik semua lini pembangunan, pembangunan fisik mental yaitu memang dari hasil musyawarah.”⁴²

D. Pelaksanaan Musyawarah Dalam Gampong Sapek

Musyawarah Gampong adalah proses musyawarah antara Badan permusyawaratan Gampong (BPG), Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPG untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah gampong. Hal yang bersifat strategis tersebut seperti, penataan Gampong, Perencanaan Gampong, Kerja sama Gampong.

⁴² Wawancara dengan Keuchik Gampong Sapek Pada Tanggal 29 juli 2021

Tahapan ke-2 yakni musyawarah gampong yang biasanya dilakukan sekitar bulan juli yang difasilitasi oleh BPD, tokoh-tokoh masyarakat, ulee jurong dari masing-masing dusun, serta perangkat gampong. Yang akan dibahas dalam forum ini lebih strategis karena membahas mengenai laporan perencanaan dari masing-masing dusun sesuai dengan skala prioritas yang dirumuskan dalam musyawarah dusun, arah kebijakan pembangunan gampong, serta belanja pemerintah gampong. Seperti wawancara dengan Sekretaris Gampong Sapek berikut:

“Dalam musyawarah desa setiap dusun akan menjelaskan mengenai rencana kegiatan yang telah diputuskan dalam musyawarah dusun yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah itu pemerintah desa akan memilih kegiatan yang ingin direalisasikan berdasarkan skala penggunaan dana desa, dalam musyawarah desa juga diungkapkan mengenai RKPG dan yang selanjutnya ditetapkan dalam APBG.”⁴³

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipasi, tertib, dan disiplin anggaran. Jangka waktu pengelolaan dana desa di mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan dituangkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pengelolaan dana desa meliputi seluruh aspek kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan yaitu proses penataan mencapai tujuan di masa yang akan datang. Setelah melakukan perencanaan kemudian pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan setelah adanya perencanaan sebelumnya. Dalam

⁴³ Wawancara dengan Sekretaris Gampong Sapek pada Tanggal 25 juli 2021

pelaksanaan pengelolaan dana desa masyarakat akan ikut mengawasi jalannya dana desa serta sebagai pekerja dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Setelah dilakukan pelaksanaan, kemudian bendahara melakukan penatausahaan. Penatausahaan adalah kegiatan bendahara dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran desa saat melakukan pelaksanaan kegiatan. Setelah bendahara melakukan penatausahaan selanjutnya sekretaris desa melakukan pelaporan atau mencatat atas kegiatan yang dilakukan yang tertera dalam RAB. Kemudian tahapan akhir yaitu penanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah konsekuensi atas penggunaan dana yang dipercayakan kepada pemerintah desa.

Di Gampong Sapek sebelum disalurkan dana desa, keuchik akan melakukan musyawarah terlebih dahulu bersama dengan sekretaris gampong, bendahara gampong, tuha peut, dan kepala lorong. Setelah melakukan musyawarah tersebut, kemudian perangkat akan melakukan musyawarah dengan masyarakat setempat atau yang disebut musrembang. Seperti wawancara dengan Keuchik Gampong Sapek:

“Semua aparat perangkat desa memang berkewajiban untuk menjelaskan tentang penggunaan dana, dan penerimaan dana desa itu memang sudah menjadi kewajiban bagi mereka.”⁴⁴

Dana merupakan bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk desa supaya dapat mengurangi kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pemerataan pembangunan. Dana tersebut berasal dari APBN yang kemudian ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota dan diberikan kepada desa. Proses pencairan dana desa dilakukan melalui beberapa tahap yaitu hal

⁴⁴ Wawancara dengan Keuchik Gampong Sapek pada Tanggal 29 Juli 2021

pertama membuat Rancangan Pendapatan dan Belanja Gampong dan Pemerintah juga membuat program yang dijalankan dengan menggunakan dana desa, tahap terakhir adalah setelah diusulkan ke kecamatan dana desa langsung di transfer melalui rekening desa (Gampong). Seperti wawancara dengan Keuchik Gampong Sapek.

“Prosesnya mulai dari program yang sudah tertuang dari RKPG rencana kerja pembangunan gampong kemudian dimuslembangkan awal tahun baru diteruskan dalam APBG kemudian, pemerintah mengeluarkan prosedur sesuai dengan kemampuan negara dan ukuran dana desa bukan di ukur dari jumlahnya penduduk tetapi dari program-program yang diajukan oleh kepala desa dan masyarakat desa.”⁴⁵

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa yang terpenting adalah pemerintah desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Untuk menjamin terwujudnya kebutuhan masyarakat, pemerintah desa perlu menciptakan kondisi yang aman, nyaman dan mungkin bagi setiap masyarakat agar dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya dalam mencapai kemajuan bersama. Oleh sebab itu, pemerintah desa perlu meningkatkan perannya secara aktif dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Pemerintah desa harus melibatkan dirinya secara langsung sehingga pelayanan masyarakat dapat berjalan semaksimal mungkin.

Adapun salah satu tugas pokok yang harus dijalankan pemerintah desa adalah melayani keperluan administrasi masyarakat seperti pengurus KK, KTP, Akte kelahiran, surat keterangan penduduk yang merupakan tanda pengenal utama yang harus dimiliki setiap masyarakat. Meskipun pengurus administrasi di atas

⁴⁵ Wawancara dengan Keuchik Gampong Sapek pada Tanggal 29 Juli 2020.

tidak dibuat secara langsung oleh pemerintah desa, akan tetapi tanda tangan kepala desa dan stempel desa merupakan syarat utama yang sangat dibutuhkan dalam pengurus administrasi tersebut.

Demikian pula dengan pemerintah desa yang ada di Gampong Sapek Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya telah berupaya memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam pengurusan administrasi warga. Pemerintah desa di Gampong Sapek Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya berperan aktif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab melayani masyarakat. Meskipun di Gampong Sapek ada kantor keuchik dan tidak berfungsi sebagai sarana utama dalam pelayanan administrasi warga, namun pemerintah desa terus berupaya memberikan pelayanan sebaik mungkin bagi masyarakat yang ingin mengurus administrasi masyarakat.

Sebagaimana observasi yang penulis lakukan di Gampong Sapek Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya terlihat bahwa meskipun tidak terlalu berfungsinya kantor keuchik namun pemerintah desa tetap berupaya memberikan pelayanan sebaik mungkin terhadap masyarakat yang ingin mengurus administrasi. Pelayanan administrasi terjadi di berbagai tempat yang memungkinkan baik di rumah keuchik, rumah sekretaris, desa dan lainnya.⁴⁶ Seperti wawancara dengan bendahara Gampong Sapek.

“Biasanya proses pelayanan administrasi di berbagai tempat yang memungkinkan seperti di rumah keuchik, rumah sekretaris desa, menasah dan lain sebagainya.”⁴⁷

⁴⁶ Hasil Observasi Penulis di Gampong Sapek Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Pada Tanggal 27 Juli 2021.

⁴⁷ Wawancara dengan Bendahara Gampong Sapek Pada Tanggal 25 Juli 2021.

Wawancara dengan Bapak Azhar selaku sekretaris Gampong Sapek juga menyebutkan bahwa:

“Untuk saat ini kantor keuchik memang belum berfungsi semestinya dan insya Allah kedepannya kantor keuchik akan berfungsi supaya masyarakat gampong sapek lebih mudah dalam mengurus administrasi atau keperluan lainnya dan juga memudahkan aparat gampong dalam mengurus data.”⁴⁸

Pendapat diatas menunjukkan bahwa proses pelayanan administrasi pelayanan administrasi tidak terjadi di kantor keuchik karena belum berfungsinya kantor keuchik sehingga pelayanan administrasi warga harus dilakukan dirumah. Kedepannya sudah diusulkan bahwa pelayanan administrasi masyarakat akan dilakukan di kantor keuchik supaya lebih memudahkan masyarakat dalam memproses pengurusan administrasi dan pembuatan data lainnya.⁴⁹

Jumlah dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ke provinsi Aceh telah mencapai 14,8 Triliun. Jumlah tersebut dibagi rata dengan jumlah desa yang ada di aceh yaitu sebanyak 6.497 desa. Salah satu kabupaten yang menerima dana Desa di Aceh adalah Kabupaten Aceh Jaya Kecamatan Setia Bakti Tahun anggaran 2021. dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 3.9 Dana angrgan Kecamatan Setia Bakti anggaran 2021

N O	Gampong	Indeks gampong	Pagu DD	Pagu ADG	Pagu bagi hasil pajak	Pagu bagi hasil resribusi	Total pagu
1.	Sawang	1114032001	787.639.000	254.098.155	3.584.730	22.703.380	1.117.989.265
2.	Padang	1114032003	736.471.000	250.451.155	3.497.730	22.377.380	1.012.797.265
3.	Lhok gelumpang	1114032002	772.198.000	251.391.155	3.511.730	22.461.380	1.049.526.265

⁴⁸ Wawancara dengan Sekretaris Gampong Sapek Pada Tanggal 25 Juli 2021.

⁴⁹ Wawancara Aparat Desa Gampong Sapek Pada Tanggal 25 Juli 2021.

4.	Gunong menasah	1114032004	768.836.000	254.260.155	3.511.730	22.717.380	1.049.365.265
5.	Sapek	1114032005	825.633.000	259.448.155	3.551.730	23.181.380	1.111.876.265
6.	Pante kuyun	1114032006	860.715.000	263.100.155	3.623.730	23.507.380	1.150.997.265
7.	Glee subak	1114032007	734.938.000	247.105.155	3.674.730	22.078.380	1.037.573.265
8.	Gampong baroh	1114032008	1.193.205.000	267.851.155	3.740.730	23.932.380	1.558.729.265
9.	Paya laout	1114032013	1.041.385.000	251.473.155	3.512.730	22.468.380	1.318.839.265
10.	Lhok timon	1114032009	783.294.000	245.057.155	3.422.730	21.895.380	1.148.669.265
11.	Gampong baro	1114032010	837.845.000	254.768.155	3.558.730	22.763.380	1.178.935.265
12.	Lhok buya	1114032011	895.426.000	279.176.155	3.899.730	24.943.380	1.268.445.265
13.	Lhok bot	1114032012	835.894.000	257.634.155	3.598.730	23.019.380	1.120.146.265

Untuk tahun anggaran 2021 Pendapatan Transfer Gampong Sapek di Tahun 2021 sebesar Rp. 1.111.876.256 seperti wawancara dengan sekcam

“ Jumlah dana yang dialokasikan untuk gampong pertahun itu beda-beda dan disesuaikan dengan program yang dibuat masyarakat dan keuchik serta bukan dilihat dari banyak atau tidaknya jumlah penduduk.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tata kelola Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Gampong Sapek telah dilaksanakan dengan tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan Qanun Nomor 1 tahun 2019.
2. Setiap masyarakat harus melapor pada Keuchik terlebih dahulu. Selanjutnya keuchik mengarahkan ke sekretaris desa dan kemudian masyarakat mendatangi keuchik kembali untuk meminta tanda tangan dan stempel desa.

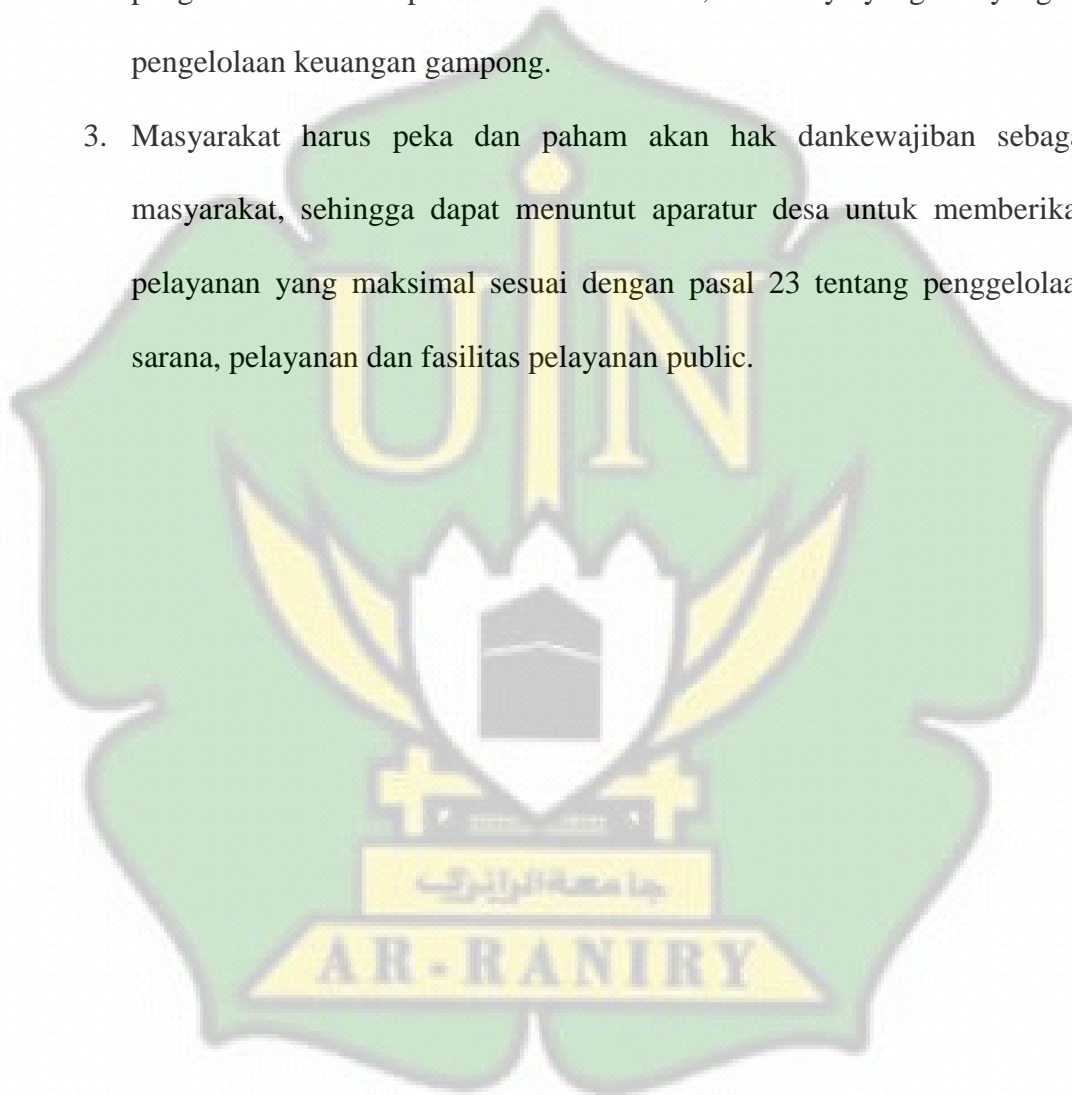
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk Gampong Sapek Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya.

1. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang informasi dan pemahaman mengenai program-program pembangunan dan pemberdayaan serta transparansi dan proses pengelolaan dana desa dalam pembangunan yang dilakukan, sehingga masyarakat akan lebih mudah diajak dalam pelaksanaan program-program pemerintah gampong. Serta ikut mengawasi jalannya pengelolaan keuangan untuk prioritas penggunaan

dana desa dan pembangunan gampong sesuai dengan tujuan dan ketentuan pedoman yang berlaku.

2. Para penggunadana desa atau perangkat desa diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan gampong.
3. Masyarakat harus peka dan paham akan hak dan kewajiban sebagai masyarakat, sehingga dapat menuntut aparatur desa untuk memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan pasal 23 tentang pengelolaan sarana, pelayanan dan fasilitas pelayanan public.



DAFTAR PUSTAKA

- Azwardi, Sukanto, Efektifitas Alokasi Dana Desa (add) da Kemiskinan di Provinsi Sumatra Selatan, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 12, No.1 (Oktober 2019), him. 29-41,
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang menjelaskan tentang desa PP Nomor. 60/2014 yang menjelaskan tentang dana desa yang bersumber dari APBN
- Profil Gampong Sapek, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) tahun anggaran 2021.
- Qanun Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong Pennendegri Nomor 113 Tahun 2014.
- Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Desa.
- Risma Hafid, 2017 "Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bunggoro Kabupaten Pangkep."(Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Fisip, Universitas hasanuddin Makassar, hlm. 22.
- Dapartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Indonesia, 2008),hal,1197
- Zakiah Derajat, Kesehatan Mental Dalam Keluarga, Cet 3 (Jakarta: Pusat antara, 1993), hal 41. Dalam Skripsi Misnidarti
- Depdikup, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1988) Hal 54
Enung Fatimah, Psikologi Perkembangan (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal 85
- A. Mangunhardjana Pembinaan, Arti dan Metodenya, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), him 11.
- Amrun Khalid, Terampil Menawan dengan Akhlak Mulia, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008),hlm 8.
- Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kamus bahasa indonesia, (Jakarta: Badan Pegembangan dan pembinaan Bahasa, 2016) Diakses Tanggal 2 Maret 2020
- Wirman Syafri, Studi tentang Administrasi Publik, (PT Gloka Askara Pratama 2012) him: 95

- Philip M Hajon. Et Syarifuddin, Hukum Negara, (Banda Aceh Syiah kuala Universitas Press: 2010), hlm. 14
- Peraturan Manteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Yayat Rakuyat, Kualitas pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan DiKecamatan Pasir Jambu, Jurnal Ilmiah Magister ilmu administrasi (JIMIA) NO.2 Tahun XI Juni 2017.Hlm 60
- Hermanto, Analisis Laporan Keuangan (2001), hal 11
- Nurul Zuriah, Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2009), hlm 47
- Mohd Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm, 65
Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm, 4
- Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma baru..., hlm, 146
Zainal Arifin, Penelitian Metode dan Pradigma baru..., hlm, 1461
- Sugiyono, Memahami Peneliti Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm, 22
- Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya. Air Langga University Press, 2001). Him, 129
- Sugiono, Memahami Pencitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm, 222,234
- Suharmisi Arikunto, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rincka Cipta, 2010), hlm. 274.
- Meolcong, Metodologi Penelitian Hlm, 2177
- Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hlm. 158.
- Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta Teras, 2009), hlm. 69
- Lexy J. Meolong. Metode Penelitian Kualitatif (Bandung Remaja Rosdakarya. 2012), hlm, 324

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta), him,270,

Profil Gampong Sapek Tahun 2021 Data Visi dan Misi desa tahun 2019-2025

Data Visi dan Misi desa tahun 2019-2025



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.297/Un.08/FDK/Kp.00.4/1/2021**

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Drs. H. Maimun Ibrahim, MA (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Fakhruddin, SE, MM (Sebagai Pembimbing Kedua)
Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Eka Safriana
NIM/Jurusan : 170403052/Manajemen Dakwah (MD)
Judul : Pola Pembinaan Administrasi Urusan Keuangan (Bendahara) Gampong di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 21 Januari 2021
8 Jumadil Akhir 1442

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,


Fakhruddin

- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal: 21 Januari 2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.869/Un.08/FDK/PP.00.9/03/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepada Yth: Keuchik Gampong Sapek
2. Tuha Peut Gampong Sapek
3. Camat Setia Bakti.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **EKA SAFRIANA / 170403052**
Semester/Jurusan : VIII / Manajemen Dakwah
Alamat sekarang : Tungkop, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **POLA PEMBINAAN ADMINISTRASI URUSAN KEUANGAN (BENDAHARA) GAMPONG DI KECAMATAN SETIA BAKTI KABUPATEN ACEH JAYA**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Maret 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2021

Drs. Yusri, M.L.I.S.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
KECAMATAN SETIA BAKTI
Jalan Banda Aceh - Meulaboh Km. 138
LAGEUN

KodePos : 23655

SURAT KETERANGAN
Nomor : 600/252 /2021

Camat Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya dengan ini menyatakan :

Nama : Eka Safriana
NIM : 170403092
Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi/Manajemen Dakwah
Judul : Pola Pembinaan Administrasi Bagian Keuangan (Bendahara)
Gampong di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya

Benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Gampong dalam Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya, dalam rangka penulisan skripsi dengan Judul : "Pola Pembinaan Administrasi Bagian Keuangan (Bendahara) Gampong di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Lageun, 27 Juli 2021
An. CAMAT SETIA BAKTI
Kasie Pembangunan
KECAMATAN
SETIA BAKTI
ACEH JAYA
NIP. 19710726 200604 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
KECAMATAN SETIA BAKTI
KEUCHIK GAMPONG SAPEK
Jalan Sapek – Gunung Meunasah No.- Telepon.-Faksimili.-
SAPEK

Kode Pos : 23655

SURAT KETERANGAN

Nomor : 600/03 /2022

Keuchik Gampong Sapek Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: Eka Safriana
NIM	: 170403092
Fakultas/Prodi	: Dakwah dan Komunikasi / Manajemen Dakwah
Judul	: Pola Pembinaan Administrasi Bagian Keuangan (Bendahara) Gampong di Kecamatan setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya

Yang namanya tersebut diatas adalah benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Gampong Sapek Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya,dalam rangka penulisan skripsi dengan Judul : **"Pola Pembinaan Administrasi Bagian Keuangan (Bendahara) Gampong di Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya"**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat,untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.





Wawancara dengan Sekcam Kecamatan Setia Bakti Pada Tanggal 19 Juli 2021



Wawancara dengan Keuchik Gampong Sapek Pada Tanggal 30 Juli 2021



Dokumentasi Sidang Munaqasyah Pada Tanggal 15 Januari 2022

